



KEPALA DESA KREO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KREO  
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KREO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat 4, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang

- Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  19. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
  22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
  23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
  25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
32. Peraturan Desa Kreo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kreo Tahun 2016 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Kreo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa Kreo (Lembaran Desa Kreo Tahun 2020 Nomor 07);
34. Peraturan Desa Kreo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kreo Tahun 2023-2028 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Desa Kreo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kreo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambi Tahun 2023-2030. (Lembaran Desa Kreo Tahun 2024 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Kreo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kreo ( RKPDes ) tahun 2025. (Lembaran Desa Kreo Tahun 2024 Nomor 04).
36. Peraturan Desa Kreo Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kreo Tahun 2024 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Kreo Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa Kreo pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kreosia tahun 2025 (Lembaran Desa Kreo Tahun 2025 Nomor 02).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KREO TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula**

berjumlah Rp.1.440.331.000,- (Satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), bertambah sejumlah Rp 0,-( Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.440.331.000,- (Satu milyar empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan Desa**

**1.1. Pendapatan Asli Desa**

a. Semula	Rp 3.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp 3.000.000

**1.2. Transfer**

a. Semula	Rp 1.436.831.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,-
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1.436.831.000,-

**1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah**

a. Semula	Rp 500.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 500.000
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.440.331.000,-

**2.Belanja Desa**

**2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

a. Semula	Rp 553.763.851,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,-
c. Setelah perubahan	Rp 553.763.851,-

**2.2. Bidang Pembangunan**

a. Semula	Rp 569.348.239,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp (168.000.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp 401.348.239,-

**2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

a. Semula	Rp 327.900.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp 327.900.000,-

**2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a. Semula	Rp 58.525.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp (5.000.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp 53.525.000,-

**2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa**

a. Semula	Rp 33.200.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp 33.200.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan

Rp 1.369.737,90,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp 173.000.000,-

**3.Pembiayaan Desa**

<b>3.1 Penerimaan Pembiayaan</b>	
a. Semula	Rp 122,406,090,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 0,
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 122,406,090,-
 <b>3.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	
a. Semula	Rp 20.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp <u>193.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a - b )	Rp (173.000.000),-

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kreo  
pada tanggal 28 Februari 2025



Diundangkan di KREO  
pada tanggal 28 Februari 2025  
SEKRETARIS DESA KREO,



LEMBARAN DESA KREO TAHUN 2025 NOMOR 2